



HUKUM ADAT

*dalam Khazanah
Sistem Hukum Nasional*

Penyunting
L. ELLY A.M. PANDIANGAN



Hukum Adat dalam Khazanah Sistem Hukum Nasional

Disusun oleh: [Nama Penulis]
[Alamat Penulis]
[Kontak Penulis]

[Teks isi yang sangat samar dan tidak terbaca]

Hukum Adat dalam Khazanah Sistem Hukum Nasional

Penulis

Hulman Panjaitan

Aartje Tehupior

Gindo L. Tobing

Nanin Koeswidi Astuti

I Dewa Ayu Widnyani

L. Elly A.M. Pandiangan

Poltak Siringoringo

Hidayat

Penyunting

L. Elly A.M. Pandiangan



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PRESS

HUKUM ADAT DALAM KHAZANAH SISTEM HUKUM NASIONAL

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Penulis

**Hulman Panjaitan, Aartje Tehupiory,
Gindo L. Tobing, Nanin Koeswidi Astuti,
I Dewa Ayu Widyani, L. Elly A.M. Pandiangan,
Poltak Siringoringo, dan Hidayat**

Penyunting

L. Elly A.M. Pandiangan

Desain Sampul dan Perwajahan Isi
Tugas Suprianto

Cetakan Pertama, Mei 2019
Tebal viii + 215 halaman

ISBN 978-623-7256-17-5

Penerbit

Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press

Kata Pengantar

Hukum dan peradilan selalu beriringan dengan perkembangan masyarakat. Selalu ada pembaruan dan perbaikan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Maka pengembangan hukum selalu bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) agar hukum yang berlaku di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan susunan masyarakat penopangnya.

Tri Darma Perguruan Tinggi menempatkan penelitian sebagai salah satu pilar penting yang diemban universitas yang ada di Indonesia, termasuk Fakultas Hukum Universitas Kristen (FH UKI). Untuk itulah, publikasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk buku menjadi sarana atau jembatan bagi masyarakat untuk mengetahui pemikiran dan gagasan para akademisi universitas —yang dalam hal ini adalah pikiran dan gagasan bagi pengembangan hukum nasional.

Kumpulan tulisan yang dihimpun dalam buku ini merupakan ikhtiar FH UKI dalam memberi sumbangsih gagasan bagi pengembangan hukum nasional kita, khususnya penggalan hukum adat dan kearifan lokal yang

telah ada di masysrakat kita untuk memperkokoh sistem hukum nasional. Meskipun kami juga menyadari bahwa apa yang disajikan dalam buku ini belum sepenuhnya sempurna.

Selamat membaca.

Jakarta, November 2018

Penyunting,

L. ELLY A.M. PANDIANGAN

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
<ul style="list-style-type: none">• Keberadaan Hukum Adat dan Yurisprudensinya dalam Sistem Hukum Nasional <i>Hulman Panjaitan</i>	1
<ul style="list-style-type: none">• Pengakuan Hukum Nasional terhadap Hukum Adat dalam Kepemilikan dan Pengolahan Tanah <i>Aartje Tehupior</i>	29
<ul style="list-style-type: none">• Hukum Adat sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan melalui Musyawarah Mufakat <i>Gindo L. Tobing</i>	53
<ul style="list-style-type: none">• Putusan Hakim dalam Sengketa Waris Adat: Sebuah Analisis Yuridis <i>Nanin Koeswidi Astuti</i>	89
<ul style="list-style-type: none">• Akomodasi Delik Lokika Sanggraha dalam Pembaruan Hukum Pidana <i>I Dewa Ayu Widyani</i>	113
<ul style="list-style-type: none">• Analisis Hukum atas Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba <i>L. Elly A.M. Pandiangan</i>	135

• Telaah Sosiologis dan Budaya atas Penerapan dan Efektivitas UU No II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <i>Poltak Siringoringo</i>	163
• Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat <i>Hidayat</i>	185
Tentang Para Penulis	211

Analisis Hukum Atas Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba

Oleh L. Elly AM Pandiangan

Sebelum memberikan analisis terhadap perkawinan satu marga menurut Adat Batak Toba, ada baiknya dalam penulis kemukakan pengertian tentang adat. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang jernih agar dapat menjelaskan dan menguraikan hal-hal menyangkut perkawinan satu marga menurut Adat Batak Toba.

'Adat' berasal dari bahasa Arab yang berarti 'kebiasaan'. Secara etimologis, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan di hormati orang. Kebiasaan itulah yang kemudian menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.

matematika, selain itu tidak bisa juga digunakan alasan saling cinta mencintai, karena dalam Adat Batak, Khususnya Batak Toba sudah ada patokan Dalihan Natolu, selain itu sejak awal pengenalan antara laki-laki dengan wanita sudah saling menanyakan marga masing-masing, sehingga adat yang benar harus dipertahankan, sehingga larangan perkawinan satu marga sampai saat ini adalah sangat relevan untuk dipertahankan.

Daftar Pustaka

- Djarena Saragih, Djisman Samosir, dan Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak, Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)* Bandung: Tarsito, Tahun 1980
- R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun 2007, Cetakan ketujuh belas.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, Tahun 2006.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asa-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Tahun 1994.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah RI No, 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



ISBN 978-623-7256-17-5



9 786237 256175